

Collaborative Governance Program Patriot Desa Dalam Mengembangkan Potensi Desa di Jawa Barat

Vita Khairunnisa Mula*, Milwan, Heri Wahyudi

Universitas Terbuka, Indonesia

*vitakamula@gmail.com

Abstract

This study analyzes collaborative governance in the Patriot Desa Program by examining how multi-actor collaboration works at the village level, particularly in villages with stagnant Village Development Index (IDM) scores such as Situhang. The research addresses the paradox between IDM improvement and weak institutionalized collaboration in assisted villages. The study aims to describe the dynamics of collaborative governance in planning and implementing the program at village level and to identify factors that limit the effectiveness and sustainability of collaboration. A qualitative descriptive approach with a case study design was employed through in-depth interviews, document analysis, and observation of provincial government actors, Patriot Desa officers, village governments, and local community leaders, using the Collaborative Governance Regime framework as an analytical lens. Findings show that collaboration opens participatory spaces and builds shared motivation at the grassroots, yet agenda setting and strategic decisions remain dominated by bureaucratic actors. Joint action capacity grows through the strengthening of local champions and initiatives based on village potentials, but resource asymmetries, actor rotation, and program cycles make collaboration largely project-based and hinder its transformation into an institutionalized governance regime. The study concludes that collaborative governance in the village context tends to take the form of an administrative collaboration regime, in which institutional trust, adaptive learning, and cross-actor policy integration are still limited. The research offers novelty by presenting a village-level perspective on how collaborative governance operates and encounters structural limits, while pointing to the need for stronger institutional design, more balanced role distribution, and post-program sustainability strategies.

Keywords: *Collaborative Governance; Patriot Desa; Village Development; Multi-Stakeholder Collaboration; West Java*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tata kelola kolaboratif dalam Program Patriot Desa dengan menyoroti bagaimana kolaborasi multiaktor bekerja di tingkat desa, khususnya pada konteks desa yang mengalami stagnasi Indeks Desa Membangun (IDM) seperti Desa Situhang. Latar belakang penelitian berangkat dari paradoks antara keberhasilan makro peningkatan IDM dan masih lemahnya pelembagaan kolaborasi di sebagian desa dampingan program. Tujuan penelitian adalah menjelaskan dinamika *collaborative governance* dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Patriot Desa di tingkat desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membatasi efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi terhadap aktor pemerintah, Patriot Desa, pemerintah desa, dan penggerak lokal, dengan kerangka *Collaborative Governance Regime* (CGR) sebagai lensa analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah membuka ruang partisipasi dan memunculkan

motivasi bersama di tingkat akar rumput, namun penentuan agenda dan keputusan strategis tetap didominasi aktor birokrasi. Kapasitas tindakan bersama meningkat melalui penguatan *local champion* dan inisiatif berbasis potensi desa, tetapi asimetri sumber daya, rotasi aktor, dan siklus program membuat kolaborasi cenderung bersifat *project-based*, belum bertransformasi menjadi rezim tata kelola kolaboratif yang melembaga. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi *collaborative governance* di desa lebih tepat dipahami sebagai rezim kolaborasi administratif, di mana kepercayaan institusional, mekanisme pembelajaran adaptif, dan integrasi kebijakan lintas-aktor belum terbentuk memadai. Secara praktis, temuan ini memberi arah perbaikan desain program. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan menawarkan perspektif dari tingkat desa tentang bagaimana *collaborative governance* beroperasi dan mengalami limitasi di lapangan, sekaligus merekomendasikan penguatan desain kelembagaan, distribusi peran yang lebih seimbang, dan strategi keberlanjutan pasca program.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*; Patriot Desa; Pembangunan Desa; Kolaborasi Multi-Aktor; Jawa Barat

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Desa dan program afirmatif lain dirancang untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola potensi lokal dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Namun, di banyak daerah, kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan desa masih beragam sehingga capaian pembangunan sering kali tidak sejalan dengan potensi yang dimiliki.

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang mendorong inovasi pembangunan desa melalui Program Patriot Desa. Program ini menghadirkan tenaga muda profesional untuk bekerja bersama pemerintah desa dan aktor lokal dalam mengidentifikasi potensi, menyusun perencanaan, serta menggerakkan berbagai inisiatif berbasis komunitas. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Patriot Desa berkontribusi pada penguatan kapasitas warga, peningkatan partisipasi, dan munculnya inisiatif pemberdayaan di tingkat desa. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya menekankan peran Patriot Desa sebagai agen pemberdayaan, belum secara mendalam membahas bagaimana relasi kekuasaan, motivasi aktor, dan kapasitas kolaboratif terbentuk serta dinegosiasikan dalam praktik. Di sisi lain, literatur *collaborative governance* dan pendekatan tata kelola kolaboratif di Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi sering kali masih didominasi pemerintah, sementara aktor non-pemerintah berperan sebagai pelengkap. Pada tingkat desa, dinamika ini menjadi semakin kompleks karena keterbatasan sumber daya, relasi patronase, dan ketergantungan pada program jangka pendek. Sampai sejauh ini, belum banyak penelitian yang menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime* (CGR) untuk membaca secara sistematis bagaimana kolaborasi di tingkat desa berlangsung, khususnya dalam konteks Program Patriot Desa yang secara desain mengandaikan kemitraan multiaktor.

Berdasarkan hal tersebut, *research gap* yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketiadaan analisis mendalam terhadap implementasi Program Patriot Desa dengan menggunakan kerangka CGR untuk menelaah dinamika kekuasaan, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan bersama di tingkat desa. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: (1) bagaimana dinamika kolaborasi antaraktor dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Patriot Desa di Desa Situhiang dilihat dari perspektif CGR; dan (2) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya, sekaligus membatasi, motivasi bersama dan kapasitas kolaboratif dalam rezim tata kelola tersebut.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: pertama, mendeskripsikan dan menganalisis dinamika *collaborative governance* Program Patriot Desa di tingkat desa dengan menggunakan kerangka CGR; dan kedua, mengidentifikasi batasan-batasan struktural maupun institusional yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi, sehingga dapat memberikan perspektif baru tentang implementasi *collaborative governance* di desa serta rekomendasi perbaikan desain program ke depan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis dinamika tata kelola kolaboratif dalam implementasi Program Patriot Desa di Desa Situhiang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pembacaan kontekstual terhadap relasi kekuasaan, motivasi, dan kapasitas kolaboratif antaraktor yang terlibat. Data yang digunakan seluruhnya berupa data sekunder melalui studi dokumentasi. Sumber data meliputi: (1) dokumen kebijakan dan regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten terkait Program Patriot Desa dan pembangunan desa; (2) dokumen program dan laporan Patriot Desa (laporan kegiatan, laporan akhir penugasan, bahan presentasi); (3) dokumen desa seperti RPJM Desa, RKP Desa, profil dan laporan realisasi kegiatan; serta (4) publikasi akademik dan artikel populer mengenai Program Patriot Desa, *collaborative governance*, dan pembangunan desa di Jawa Barat. Dokumen diperoleh dari arsip pemerintah, laman resmi, repositori lembaga pengelola program, dan basis data publikasi ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis tematik dengan menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime* (CGR) sebagai lensa utama. Prosesnya mencakup: pembacaan dan pengorganisasian dokumen; pengodean bagian-bagian teks yang berkaitan dengan konteks sistem, aktor, proses kolaborasi, dan hasil; kemudian pengelompokan kode ke dalam komponen utama CGR, seperti *system context*, *drivers*, *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Dari sini disusun pola-pola temuan yang menggambarkan bagaimana rezim kolaboratif terbentuk, dijalankan, dan dibatasi di tingkat desa. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi tentang peristiwa atau kebijakan yang sama dari berbagai jenis dokumen (dokumen kebijakan, laporan program, dan dokumen desa), serta dari aktor yang berbeda. Triangulasi teori dilakukan dengan mengaitkan temuan tidak hanya dengan kerangka CGR, tetapi juga dengan literatur tata kelola dan pemberdayaan desa, sehingga penafsiran tidak bergantung pada satu kerangka teoritik saja. Penelitian ini memiliki beberapa batasan. Data sepenuhnya bersumber dari dokumen, tanpa wawancara atau observasi langsung, sehingga interpretasi sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan perspektif yang tercermin dalam dokumen. Selain itu, fokus pada satu desa studi kasus membatasi generalisasi statistik, namun memberikan kedalaman analitis yang dapat menjadi rujukan bagi studi lanjutan mengenai implementasi *collaborative governance* di tingkat desa.

Hasil Dan Pembahasan

1. Dinamika Kolaborasi dalam Program Patriot Desa

a. *Principled Engagement*

Pada dimensi *principled engagement*, forum musyawarah desa, pertemuan perencanaan, dan diskusi informal yang difasilitasi Patriot Desa menjadi ruang utama untuk mengungkap kepentingan dan gagasan berbagai aktor. Dokumen musyawarah desa dan laporan kegiatan Patriot Desa mencatat, misalnya, pembahasan bersama mengenai pengembangan jalur wisata dan penguatan BUMDes sebagai prioritas desa. Namun, agenda final dan keputusan strategis tetap sangat dipengaruhi oleh kerangka regulasi dan

prioritas yang ditetapkan pemerintah provinsi dan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses deliberatif memang dibuka, tetapi kewenangan menentukan arah kebijakan tetap terpusat pada aktor birokrasi, sehingga co-determination yang ideal dalam *collaborative governance* belum sepenuhnya tercapai.

b. Shared Motivation

Pada dimensi *shared motivation*, dokumen laporan program menggambarkan meningkatnya kepercayaan warga terhadap Patriot Desa dan pemerintah desa, tercermin dari partisipasi rutin dalam kerja bakti, kegiatan wisata, dan pengembangan produk lokal. Patriot Desa yang tinggal di desa dan terlibat dalam aktivitas sehari-hari memperkuat kedekatan interpersonal dan rasa memiliki terhadap program. Namun, motivasi bersama ini bersifat rapuh karena bertumpu pada figur tertentu (Patriot dan kepala desa) dan belum sepenuhnya ditopang oleh mekanisme kelembagaan yang stabil. Pergantian aktor berpotensi memutus jejaring kepercayaan yang telah terbentuk.

c. Capacity for Joint Action

Pada dimensi *capacity for joint action*, laporan Patriot Desa dan dokumen desa menunjukkan adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan penyusunan dokumen desa, serta pengembangan kelembagaan BUMDes dan Kelompok Sadar Wisata. Kapasitas ini terutama berkembang pada level komunitas dan aktor desa yang dekat dengan Patriot. Namun, distribusi sumber daya dan otoritas tetap timpang: pemerintah provinsi dan kabupaten memegang kendali atas anggaran dan regulasi, sementara desa dan komunitas lebih banyak berperan sebagai pelaksana. Ketimpangan ini membuat kapasitas tindakan bersama bergantung pada dukungan program dan belum bertransformasi menjadi kemampuan kolaboratif yang otonom dan berkelanjutan.

2. Tindakan Kolaboratif (*Collaborative Actions*)

Dalam praktik, dinamika di atas terefleksikan dalam sejumlah tindakan kolaboratif yang terdokumentasi dalam laporan desa dan laporan akhir Patriot Desa. Contohnya, pembangunan jalan wisata sepanjang kurang lebih 4 km yang dikerjakan melalui kerja bakti dan swadaya masyarakat, penyelenggaraan event Trail Run Curug Situhiang yang melibatkan pemerintah desa, komunitas lokal, dan jejaring komunitas lari dari luar desa, serta pendampingan BUMDes hingga memperoleh legalitas dan mulai masuk ke ekosistem pemasaran digital dan e-katalog.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kolaborasi mampu menghasilkan inisiatif konkret yang memanfaatkan potensi lokal dan memperkuat identitas desa wisata. Namun, dokumen perencanaan desa dan pedoman program juga memperlihatkan bahwa inisiatif tersebut tetap harus menyesuaikan diri dengan skema program dan prosedur birokrasi yang ditetapkan dari atas. Misalnya, penganggaran kegiatan dan pengakuan formal terhadap BUMDes tetap bergantung pada persetujuan pemerintah kabupaten/provinsi dan mengikuti indikator seperti Indeks Desa Membangun (IDM). Dengan demikian, ruang inovasi lokal yang difasilitasi Patriot Desa berjalan dalam batas-batas yang ditentukan oleh struktur kekuasaan formal.

Ketimpangan kekuasaan juga tampak pada posisi aktor non-pemerintah. Komunitas, kelompok pemuda, dan pelaku usaha lokal dilibatkan dalam implementasi kegiatan misalnya sebagai panitia event wisata atau mitra promosi produk namun tidak memiliki posisi kuat dalam penentuan arah program jangka panjang. Dokumen rapat desa menunjukkan bahwa usulan mereka sering kali harus “diterjemahkan” terlebih dahulu oleh Patriot Desa atau perangkat desa agar sesuai dengan bahasa dan format kebijakan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun kolaborasi membuka ruang partisipasi, struktur kekuasaan yang hierarkis membuat peran aktor non-pemerintah cenderung pelengkap, bukan mitra sejajar.

3. Dampak dan Adaptasi (Impacts and Adaptation)

Secara substantif, tindakan kolaboratif dalam Program Patriot Desa di Situhiang menghasilkan beberapa dampak jangka pendek: meningkatnya aksesibilitas dan daya tarik desa melalui jalur wisata, menguatnya kohesi sosial melalui kerja bakti dan kegiatan bersama, serta tumbuhnya embrio aktivitas ekonomi baru berbasis pariwisata dan produk lokal. Dokumen desa dan laporan program mencatat peningkatan kunjungan ke destinasi wisata, menguatnya peran BUMDes, dan bertambahnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi desa. Namun, dari perspektif CGR, kapasitas adaptif rezim kolaboratif ini masih terbatas. Mekanisme *feedback* dan pembelajaran yang tercermin dalam dokumen evaluasi program lebih banyak bersifat administratif misalnya pelaporan capaian output dan penyesuaian indikator—daripada refleksi bersama mengenai distribusi peran dan kekuasaan. Ketergantungan yang kuat pada skema program dan figur Patriot Desa membuat keberlanjutan inisiatif menjadi tanda tanya ketika program berakhir atau ketika terjadi rotasi aktor.

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa *collaborative governance* dalam Program Patriot Desa di Desa Situhiang lebih tepat dipahami sebagai rezim kolaborasi administratif yang sudah membuka ruang partisipasi dan menghasilkan inisiatif konkret, tetapi masih dibatasi oleh ketimpangan kekuasaan, dominasi agenda birokrasi, dan kapasitas adaptif yang belum sepenuhnya terlembaga. Di sinilah pentingnya perbaikan desain kelembagaan dan mekanisme *power sharing* jika kolaborasi di tingkat desa ingin berkembang menjadi rezim tata kelola yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan.

4. Faktor Penghambat Collaborative Governance Program Patriot Desa

Hambatan yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat dibaca lebih tajam jika dikaitkan langsung dengan komponen CGR. Hambatan struktural seperti ketidakjelasan pembagian peran, keterbatasan anggaran desa, dan lemahnya koordinasi provinsi kabupaten desa secara langsung membatasi *capacity for joint action*. Ketika alur otoritas dan sumber daya tidak jelas atau terkonsentrasi di satu level pemerintahan, kemampuan aktor-aktor lokal untuk merencanakan dan bertindak bersama menjadi terfragmentasi. Hambatan struktural ini juga memengaruhi *principled engagement* karena forum-forum dialog yang ada tidak diikuti oleh jaminan bahwa hasil musyawarah akan ditopang oleh dukungan kelembagaan dan anggaran yang memadai. Hambatan kultural berhubungan dengan nilai, kebiasaan, dan budaya kerja. Di satu sisi, nilai gotong royong, solidaritas, dan religiusitas menjadi modal sosial yang *memperkuat shared motivation*. Di sisi lain, budaya ketergantungan pada arahan pemerintah, resistensi terhadap perubahan, dan birokratisme aparatur desa menghambat munculnya inisiatif dari bawah dan berbagi risiko di antara aktor. Hal ini mengurangi kelenturan aktor lokal untuk beradaptasi dan memperkuat *capacity for joint action* yang otonom.

Hambatan politis, seperti orientasi pemerintah pada pencapaian angka IDM, dinamika politik lokal, dan perubahan prioritas anggaran provinsi, berpengaruh langsung terhadap *shared motivation* dan keberlanjutan kolaborasi. Ketika aktor-aktor kunci memaknai kolaborasi terutama sebagai instrumen untuk mencapai target kinerja jangka pendek, kepercayaan dan komitmen jangka panjang antarpihak menjadi rapuh. Patriot Desa dan komunitas dapat terdorong secara moral, tetapi tetap berada dalam struktur insentif politik yang tidak selalu mendukung keberlanjutan kolaborasi. Dengan demikian, hambatan struktural, kultural, dan politis dalam Program Patriot Desa tidak hanya menjelaskan mengapa kolaborasi cenderung project-based dan gagal terlembaga, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ketiga dimensi tersebut secara simultan melemahkan *principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action* dalam kerangka CGR.

Kesimpulan

Dengan menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime* (CGR), penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam Program Patriot Desa di Desa Situhiang membentuk rezim kolaboratif yang terbuka tetapi masih hierarkis. Principled engagement memang terwujud dalam berbagai forum musyawarah, namun penetapan agenda dan keputusan strategis tetap didominasi aktor birokrasi. Ketimpangan kekuasaan ini membuat ruang partisipasi lebih berfungsi sebagai kanal aspirasi ketimbang ruang co-determination yang setara. Pada dimensi *shared motivation*, kepercayaan dan komitmen bersama tumbuh terutama melalui relasi interpersonal antara Patriot Desa, pemerintah desa, dan komunitas. Namun, lemahnya trust institusional dan ketiadaan mekanisme formal yang menjamin kelanjutan peran dan dukungan membuat motivasi bersama tersebut rapuh. Sementara itu, *capacity for joint action* meningkat melalui berbagai inisiatif konkret (pengembangan jalur wisata, penguatan BUMDes, digitalisasi promosi), tetapi kapasitas ini tidak seimbang karena desa dan komunitas tetap bergantung pada otoritas dan sumber daya yang dikendalikan pemerintah supra-desa. Kolaborasi yang terbentuk bersifat project-based dan gagal terlembaga, antara lain akibat keterbatasan anggaran, masa tugas Patriot Desa yang singkat, lemahnya koordinasi lintas OPD, serta tidak adanya instrumen evaluasi kolaboratif yang mendorong pembelajaran adaptif. Secara teoretis, temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan *shared motivation* dan *capacity for joint action* di tingkat lokal tidak otomatis menghasilkan rezim *collaborative governance* yang terinstitusionalisasi ketika ketimpangan kekuasaan tinggi dan trust institusional lemah. Secara praktis, implikasinya bagi pemerintah provinsi adalah perlunya desain program yang lebih panjang dan terkoordinasi lintas OPD, serta instrumen evaluasi yang menilai kualitas proses kolaboratif, bukan hanya output. Bagi pemerintah desa, penting untuk mengintegrasikan praktik kolaboratif ke dalam mekanisme formal desa, mengalokasikan anggaran bagi keberlanjutan inisiatif, dan memperluas peran aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kolaborasi yang semula bersifat proyek tunggal berpeluang bergerak menuju tata kelola kolaboratif yang lebih setara dan berkelanjutan di tingkat desa.

Daftar Pustaka

- Amaliah, N. (2021). Kolaborasi dalam Pembangunan Desa: Hambatan dan Peluang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pembangunan*, 8(1), 51–65.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ariadi, T. (2019). Inovasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Patriot Desa. *Jurnal Pembangunan Desa*, 14(2), 73–84.
- Bittner, E. A. C., & Leimeister, J. M. (2014). Creating Shared Understanding in Heterogeneous Work Groups: Why It Matters and How to Achieve It. *Journal of Management Information Systems*, 31(1), 111–143.
- Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *Academy of Management Review*, 20(1), 92–117.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Fares, J., Andrade, A., & De Montigny, L. (2021). Stakeholder Theory and Management: Understanding Longitudinal Collaboration Networks. *PLOS ONE*, 16(10), e0255658.

- Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi di Desa Bojongmengger, Kabupaten Ciamis). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 502–513.
- Kumala, L., Ismail, F., & Santoso, R. (2024). Strengthening Village Collaborative Governance in West Java: Challenges and Opportunities. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 12(1), 89–105.
- Mahajan, A. P. (2024). *Public Governance Dynamics: Comparative Administrative Systems*. New Delhi, India: Routledge India.
- Maulia, E. I., & Setiyono, B. (2023). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 404–418.
- Nubu, A., & Mattalitti, M. I. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, 1(2), 77–99.
- Pilon, M., & Brouard, F. (2025). From Traditional to Collaborative Governance: A Stakeholder Environment Framework. In G. Plaisance & A. Goujon Belghit (Eds.), *Non-Profit Governance: Twelve Frameworks for Organizations and Research* (pp. 13–28). New York, NY: Routledge.
- Rahayu, R., & Pramitasari, L. (2024). Multi-Stakeholder Collaboration for Inclusive Village Development: Lessons from West Java. *Journal of Social Development*, 9(1), 34–47.
- Sujatmiko, W., & Alwi, S. (2023). The Role of Local Government in Collaborative Rural Development in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 119–133.
- Susilawati, T. S., Subagyo, A., & Permana, D. (2024). Peran Koordinasi Patriot Desa dalam Pembangunan Desa di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–15.
- Syafriani, A., Pratama, B., & Hidayat, S. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 13(2), 100–120.